



SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO DALAM

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD
KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN WONOSOBO**

DAN

**PENYAMPAIAN PENJELASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2017**

SENIN, 2 APRIL 2018



**PEMERINTAH
KABUPATEN
WONOSOBO**



**PEMERINTAH
KABUPATEN
WONOSOBO**



BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO
DALAM
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO
PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD
KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP RAPERDA KABUPATEN
WONOSOBO
DAN
PENYAMPAIAN PENJELASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2017

Senin, 2 April 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian,

Yang terhormat, Saudara Ketua, Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD;

Yang kami hormati, Sdr Wakil Bupati Wonosobo,

Sekretaris Daerah beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Wonosobo;

Rekan-rekan pers, serta hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu; Warga masyarakat Wonosobo pendengar siaran radio Pesona FM di manapun berada.

Pertama-tama, marilah kita awali bersama pertemuan pada hari ini dengan memanjatkan do'a dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan, kita bisa mengemban

tanggung jawab dan pengabdian kepada negara ini secara amanah, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Wonosobo. Amin ya robbal 'alamin.

Sebelum menyampaikan pengantar tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2017 ini, kami memberikan apresiasi atas pembahasan bersama oleh Eksekutif dan Legislatif terhadap lima rancangan peraturan daerah, yaitu:

1. Perda tentang BPD;
2. Perda tentang Penetapan Desa;
3. Perda tentang Usaha Pariwisata;
4. Perda tentang Perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
5. Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Pembahasan dan penetapan beberapa Perda pada awal tahun ini, seperti yang dilakukan tahun lalu, kita harapkan mempercepat langkah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan sesuai amanat RPJMD Tahun 2016-2021.

Kami menyadari, bahwa pembahasan Raperda-Raperda dimaksud banyak memunculkan dinamika dalam pembahasannya, khususnya persoalan antara pelaksanaan desentralisasi dan kesesuaian antara Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam implementasinya, kearifan dalam muatan lokal lebih sering bersinggungan dengan kesesuaiannya dengan peraturan d i atasnya. Namun demikian kami maklumi, bahwa dinamika dan perbedaan perspektif yang terjadi dalam pembahasan sama-sama bertujuan untuk Wonosobo yang lebih baik.

Tentu saja, menjadi harapan kita bersama agar pasca penetapan Raperda ini seluruh pihak terutama eksekutif dan legislatif dapat mendukung pelaksanaan Perda yang telah kita setuju bersama, secara konsekuen dan konsisten.

Untuk itu, atas nama pribadi dan segenap unsur pemerintah kabupaten wonosobo, kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pembahasan Raperda sejak mulai disusun sampai dengan disetujui bersama pada hari ini banyak kekurangan maupun kekhilafan.

Rapat Paripurna Dewan, hadirin sekalian yang kami hormati, dan pendengar Radio Pesona FM yang berbahagia,

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaporan LKPJ 2017 yang kami sampaikan hari ini adalah bagian dari siklus rutin tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana Bupati menyampaikan keterangan tentang hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyampaian LKPJ ini sudah diawali dengan surat No. 130/040/2018 tertanggal 27 Maret 2018 perihal LKPJ Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2017, sekaligus permohonan kepada DPRD Wonosobo untuk mengagendakan pembahasan LKPJ dimaksud.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perundangan, kami akan menyampaikan secara singkat pengantar dokumen LKPJ ini untuk kemudian dibahas oleh Dewan bersama jajaran eksekutif sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan.

Dalam kerangka regulasi, LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD yang merupakan aturan turunan dari Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Pasca Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, belum ada Peraturan Pemerintah yang secara teknis menjelaskan tentang format dan sistematika pelaporan kinerja Bupati sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Maka sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ Tahun 2017 dijabarkan ke dalam 4 jenis atau tingkat urusan yaitu: urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 urusan; urusan wajib non pelayanan dasar sebanyak 18 urusan; urusan pilihan sebanyak 7 urusan; ditambah 4 fungsi penunjang dan 3 fungsi lain urusan pemerintahan.

Urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan **pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;** dan urusan **sosial**. Enam urusan ini terkait langsung dengan kewajiban Negara untuk memberikan layanan dasar kepada warga pada aspek yang paling fundamental.

Selanjutnya, urusan wajib non pelayanan dasar mencakup urusan sebagai berikut:

1. Urusan tenaga kerja;
2. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Urusan pangan;
4. Urusan pertanahan;
5. Urusan lingkungan hidup;
6. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Urusan perhubungan,
10. Urusan komunikasi dan informatika;
11. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Urusan penanaman modal;
13. Urusan kepemudaan dan olahraga;
14. Urusan statistik;
15. Urusan persandian;
16. Urusan kebudayaan;
17. Urusan perpustakaan; dan
18. Urusan kearsipan.

Selanjutnya, **urusan pilihan** meliputi urusan kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; serta perindustrian dan transmigrasi.

Di luar ketiga jenis urusan tersebut, masih ada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan.

Juga ada fungsi lain yaitu kerjasama daerah; pengawasan; hukum dan penataan peraturan perundang-undangan dan administrasi pemerintahan.

Hadirin sekalian dan pendengar Radio Pesona FM yang kami hormati,

Selanjutnya, untuk memudahkan pembahasan LKPJ dalam Rapat paripurna dan Komisi, kami ingin menjelaskan sekilas tentang dokumen LKPJ Tahun 2017 sebagai berikut:

Bagian Pertama adalah Buku LKPJ itu sendiri, yang memuat penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan nomenklatur urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pada buku LKPJ ini, dipaparkan program, kegiatan dan realisasi APBD Tahun 2017 yang secara pembukuan dicatat berdasarkan data perhitungan APBD tanggal 29 Maret 2018, sehingga angka ini belum merupakan hasil audit BPK. Selanjutnya pemaparan pada setiap urusan menjelaskan pokok-pokok capaian RKPD tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja RPJMD 2016-2021.

Selain itu, pada Buku LKPJ ini juga ada penjelasan tentang Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Wonosobo serta penyelenggaran Dana Desa.

Versi singkat dari Buku LKPJ ini kami tuangkan dalam Ringkasan LKPJ, yang memuat pokok-pokok substansi dari seluruh bab.

Selanjutnya, **Bagian Kedua** dari dokumen LKPJ adalah lampiran berisi data atau tabel kegiatan APBD tahun 2017 yang sudah diolah dan disesuaikan dengan nomenklatur urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Tabel ini merupakan penjelasan tambahan yang memberikan gambaran singkat tentang kegiatan APBD tahun 2017 berdasarkan perangkat daerah pelaksana, alokasi anggaran dan realisasinya, keterangan tentang metode pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan yang ada komponen tersebut, serta *check-list* tentang substansi kegiatan.

Dokumen-dokumen itulah yang akan dipakai dalam pembahasan LKPJ pada Rapat Paripurna/Komisi DPRD, sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD. Tentu, pembahasan LKPJ ini lebih kepada substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan RPJMD dan RKPD, **sedangkan pertanggungjawaban keuangan secara lebih rinci akan disampaikan pada forum Laporan Keuangan Daerah (LKD) setelah selesai audit dari BPK terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Wonosobo.**

Hadiri sekalian yang kami hormati,

Berdasarkan fokus isu tahunan pada periode pertama RPJMD Tahun 2016-2021, maka tema pembangunan tahun 2017 adalah "**Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan**". Tema tersebut dijabarkan ke dalam fokus prioritas pembangunan pada enam isu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik,
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah,
4. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan,
5. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran,
6. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM,
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim, dan
8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi.

Demikianlah delapan isu prioritas 2017, yang kemudian diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui APBD tahun 2017 bersama penyelenggaraan fungsi dasar pemerintahan lainnya.

Dari sisi kebijakan keuangan Daerah, resume penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017 bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan dianggarkan sebesar **Rp1.843.308.209.585**, dapat direalisasi sebesar **Rp1.829.284.528.788,00** atau **99,24%** yang berarti kurang dari anggaran sebesar **Rp14.023.680.797,00**
2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah Perubahan sebesar **Rp2.000.613.704.761,00** dapat direalisasi **Rp1.715.290.159.198,00** atau **85,74%** kurang dari anggaran sebesar **Rp285.323.545.563,00**
3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar **Rp178.535.995.176,00** dapat direalisasi sebesar **Rp178.694.891.234,00** atau **100,09%**, lebih dari anggaran sebesar **Rp158.896.058,00** yang terdiri dari :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan **Rp178.535.995.176,00** dapat direalisasi sebesar **Rp178.694.891.234,00**
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan **Rp0,00** dapat direalisasi sebesar **Rp158.896.058,00**.
 - b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp21.230.500.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp21.230.500.000,00 atau 100,00 % berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dianggarkan **Rp21.230.500.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp21.230.500.000,00** atau 100,00%

Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp271.458.760.824,00** .

Dari implementasi APBD Tahun 2017 tersebut, sebagian besar belanja dipakai untuk belanja pelayanan dasar maupun layanan wajib yang bersifat penting

untuk mendukung visi RPJMD, pada delapan isu prioritas Daerah tahun 2017.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, dan hadirin sekalian yang kami muliakan,

Sebelum menutup sambutan pengantar ini, kami ingin menyampaikan lagi komitmen kita tentang upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus untuk mendukung reformasi birokrasi di bidang tata kelola perencanaan dan penganggaran.

Kita ketahui bersama, tahun 2018 ini kita sudah mulai mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran secara elektronik (*e-planning* dan *e-budgetting*) secara menyeluruh untuk perencanaan RKPD Tahun 2019. Proses tersebut sudah dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten yang semuanya sudah menggunakan *e-planning* sebagai sistem tunggal dalam perencanaan.

Relevan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota dewan atas usulan kegiatan untuk RKPD tahun 2019 yang sudah diinput melalui sistem tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan siklus perencanaan daerah, kami akan melakukan proses verifikasi usulan tersebut sesuai dengan kewenangan kabupaten, mempertimbangkan prioritas daerah dan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2019. Proses tersebut sekaligus merupakan sinkronisasi dari lima pendekatan perencanaan ke dalam sistem perencanaan elektronik, termasuk pendekatan politis sebagai salah satu komponennya.

Terkait dengan perkembangan inisiatif perencanaan dan penganggaran secara elektronik ini, kami sampaikan juga bahwa pada Rabu 28 Maret 2018, beberapa perangkat daerah Pemkab Wonosobo diundang oleh KPK untuk dimonitor *progress report* rencana aksi penanggulangan korupsi, yang di dalamnya termasuk juga penerapan integrasi perencanaan dan penganggaran secara elektronik. Pada kesempatan tersebut, KPK memastikan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan kaidah yang benar sesuai prinsip-prinsip perencanaan.

Oleh karena itu, kami mohon komitmen dan dukungan segenap pihak termasuk DPRD, agar *e-planning* dan *e-budgetting* tersebut benar-benar

ditaati, sebagai bagian dari upaya besar untuk reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Demikian pengantar singkat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017, dan selanjutnya dokumen ini akan dibahas lebih mendalam oleh Dewan yang terhormat bersama perangkat daerah terkait sesuai jadwal yang telah disepakati. Kepada pimpinan perangkat daerah, sudah kami instruksikan untuk mengikuti proses ini secara seksama, sebagai bagian dari evaluasi kinerja daerah berdasarkan RPJMD sekaligus untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam mencapai indikator yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya juga kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, jajaran Forkopimda, perangkat Pemerintah Daerah dan segenap elemen pemangku kepentingan atas kerjasama dan dukungannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017. Kami mohon maaf atas beberapa target pembangunan yang belum tercapai, dan secara tulus, kami mengajak agar kemitraan ini bisa lebih dibangun dan dikuatkan lagi untuk mewujudkan Wonosobo yang Bersatu Untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera Untuk Semua.

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa, senantiasa meridloi usaha kita. Amin ya rabbal 'alamin.

Sekian dan terima kasih, Wabillahittaufiq wal hidayah, Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO